

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

Asdar

Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: asdar@unismuh.ac.id

Naidah

Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: naidah@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of government spending and population on local revenue in Makassar City. The analysis method used in this research is multiple linear regression. Based on the results of the calculation of SPSS version 2.3, it shows that government spending has a positive and significant effect on Regional Original Income (PAD) in Makassar City, where the regression coefficient is 1.108 with a significant level of 0.011 ($0.011 < 0.05$). Meanwhile, the population has a negative and significant effect on Regional Original Income (PAD) in Makassar City, where the regression coefficient is -5.861 with a significant level of 0.003 ($0.003 < 0.05$).

Keywords: Government Expenditure, Total Population and Regional Original Income (PAD)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 2.3 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar, dimana koefisien regresi sebesar 1,108 dengan tingkat signifikan sebesar 0,011 ($0,011 < 0,05$). Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar, dimana koefisien regresi sebesar -5,861 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 ($0,003 < 0,05$).

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. PENDAHULUAN

Berlakunya otonomi daerah, kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia UU RI Nomor.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU RI Nomor.32 tahun 2004 tentang pembagian urusan pemerintah, juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu, ada 16 kewenangan yang dimiliki oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri. Pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Dalam mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal, maka diberlakukannya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini di atur dalam UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. Desentralisasi fiskal yang di atur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam yaitu pajak daerah (*tax assignment*), dana bagi hasil (*revenue sharing*) dana alokasi umum sertadana alokasi khusus. Desentralisasi fiskal ini pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan

dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah, seperti diatur dalam UU RI No. 33 tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan dalam UU RI No. 33 tahun 2004 pasal 2 di jelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsisten keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan. Dalam UU RI No. 33 tahun 2004 pasal 3 tentang perimbangan keuangan dijelaskan dana pemerintah dan pemerintah bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini dari terdiri dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Berdasarkan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Soleh dan Rochmansjah (2010:20) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat). Menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk

dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, sedangkan proporsi PAD masih relatif kecil. Adanya dana perimbangan melalui DAU ini ternyata justru menjadi ketergantungan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang di gali dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain. Pendapatan Asli Daerah juga digunakan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah (Darise, 2009: 48).

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan resmi daerah yang terus diupayakan untuk ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang semakin nyata, dinamis dan bertanggungjawab dan dapat terwujud.

Peran pemerintah dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu perekonomian yang dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah terutama dalam sektor pelayanan publik. Sebagian pengeluaran pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam pembangunan infrastruktur suatu wilayah atau daerah, oleh sebab itu pemerintah mempunyai kekuatan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian, disamping itu pemerintah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya (Deliamov 2008: 168).

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termaksud anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lainnya untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan dan tingkat kegiatan ekonomi. Meningkatnya kegiatan ekonomi maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka peneliti akan mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yaitu "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung diakui oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak, Pada umumnya pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus

dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada anggaran daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan di gunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Rindu K (2009 ; 23) dalam struktur yang baru, sisa lebih APBN tahun lalu dan pinjaman (utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun di masukan sebagai pembiayaan daerah, sedangkan anggaran belanja rutin dan pembangunan yang ada pada struktur APBN sebelumnya di arahkan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal yang diklasifikasikan dalam belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik, dengan struktur yang baru akan lebih mudah mengetahui surplus dan defisit dari anggaran dan pendapatan belanja daerah sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik).

Wanimbo (2013;11) pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja pun memiliki pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penelitian yang di lakukan oleh Amuna (2012;11), menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK), pendapatan asli daerah (PAD), dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kewenangan ekonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintah, seperti perencanaan, perizinan, pelaksanaan, kecuali kewenangan di bidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang di atur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi di tingkat provinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak atau belum di laksanakan daerah otonom kabupaten dan kota, serta kewenangan pemerintah lainnya.(safitri 2009 : 20).

Halim Abdul & Mujib Ibnu (2009: 19) menjelaskan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu berupa sistem keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembangian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar tingkat pemerintah sesuai dengan peraturan UU tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi ruang lingkup pengaturan dari :

1. Prinsip-prinsip pembiayaan fungsi pemerintah di daerah

2. Sumber-sumber pembiayaan fungsi dan tugas tanggung jawab daerah yang meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Pinjaman
 - d. Pembiayaan pelaksanaan asas dekonsentrasi bagi provinsi
 - e. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah
 - f. informasi keuangan daerah

Berdasarkan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan dana pemerintah daerah pasal 27 jumlah dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dilaksanakan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Yang dimaksud celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurang dengan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 28 yang dimaksud kebutuhan fiskal daerah adalah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan yang dimaksud kapasitas fiskal daerah adalah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil.

2.3 Belanja Daerah

Pajak daerah yang identik dengan pajak memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli yaitu pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah disamping retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Berdasarkan permendagri No. 13 tahun 2006, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten /kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang di tetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Mardiasmo (2008:12-13) istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

- a. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang terutang,

termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas, sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam permendagri No 13 tahun 2006 pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Yang termaksud urusan wajib adalah sebagai berikut: pendidikan, kesehatan, pekerja umum, perumahan rakyat, penataan ruangan, perencanaan pembangunan, perhubungan, pertahanan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, sosial, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemudah dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik luar negeri, pemerintah umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, komunikasi dan informatika. Sedangkan yang termaksud urusan pilihan sebagai berikut: pertanian, kehutanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, transmigrasi.

Belanja menurut urusan pemerintah penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undang di jabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklarifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

- 1) Pelayanan umum
- 2) Ketertiban dan ketentraman
- 3) Ekonomi
- 4) Lingkungan hidup
- 5) Perumahan dan fasilitas umum
- 6) Kesehatan
- 7) Pariwisata dan budaya
- 8) Pendidikan
- 9) Perlindungan sosial

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) permendagri No. 13 tahun 2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Yang termaksud belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja bunga
- 3) Belanja subsidi
- 4) Belanja hibah
- 5) Bantuan sosial
- 6) Belanja bagi hasil
- 7) Bantuan keuangan
- 8) Belanja tidak tertuga

Kegiatan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang termaksud belanja langsung sebagai berikut:

1) Belanja modal

Belanja modal untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja dan jasa barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dsan kegiatan pemerintah daerah.

2.4 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat di pengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang di tarik juga akan meningkat (simanjuntak 2011 :732). Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah menurut Population Reference Bureau (PRB 2011).

Penduduk adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia (UU No. 24 tahun 2013). Jumlah penduduk merupakan faktor penentu adanya disparitas

pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan, dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Jaya dan Widanta 2014: 202).

Anata (2008:37) menjelaskan bahwa, penduduk adalah yang berdomisili di wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif. Penduduk yang produktif merupakan harapan dari pemerintah daerah, semakin penduduk produktif maka semakin besar kesempatan kerja yang tercipta, selain itu juga jumlah penduduk kota yang diimbangi dengan SDM yang telah terdidik akan membantuh membangun pamarintah daerah.

Oleh karena itu penduduk sangat menentukan perekonomian di pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Jadi penduduk diharapkan, tetapi di imbangi dengan kesempatan kerja serta perekonomian baru yang kemudian pada jangka panjang akan lebih mengarah pada pembangunan pemerintah.

Adapun hukum Wagner (dalam Mangkoesobroto, 2010:171) mengutarakan bahwa dalam suatu perekonomian di dalam masyarakat, apabila jumlah pendapatan meningkat perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat karena disebabkan adanya penerimaan pendapatan yang melalui

pajak dan retribusi didalam kegiatan ekonomi.

Adam Smith (dalam Santoso dan Retno, 2010: 16) berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris tentang pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menaikkan *output* melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar, dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk yang tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat di tarik juga meningkat.

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga digunakan sebagai sumber penerimaan yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan kegiatan rutin maupun pembangunannya yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah,

bagian laba usaha milik daerah, dan lain lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2014:16).

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU RI No.33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah), pendapatan daerah berasal daerah penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sistem bambagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembaruan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU RI No. 28 tahun 2009 tentang perimbangan keuangan yaitu sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain serta penerimaan keuangan tersebut di atur oleh daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008:10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya, jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat

berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin terlalu tergantung dari APBN, kemajuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan PAD yang positif disisi penerimaannya dan peranannya dari tahun ke tahun makin meningkat.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, di lain pihak menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun bangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pratiwi, 2008:16).

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. (Safitri, 2009:24).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan hasil yang di peroleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelola APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Yani (2008 :73).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah

- 3) Hasil pengelolaan daerah yang di pisahkan dan

- 4) Lain lain pendapatan daerah yang sah

b. Pendapatan transfer

- c. Lain lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Yani (2008 : 74) PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan. Jenis jenis pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Pendapatan denda pajak.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi sehingga bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut daerah karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang pemungut retribusi. (Prakaso, 2010: 20). Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberi kan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh

pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- 3) Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi aras kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan: pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas, tertentu guna melindungikepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan dengan undang-undang RI No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang No 17 tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai bagi hasil penerimaan pajak penghasilan (PPH) pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi, selain itu dana reboisasi yang semula termaksud bagian dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diahlikan menjadi DBH.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksimalkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formulah yang mempertimbangkan

kebutuhan dan potensi daerah, DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gab*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Dalam undang-undang ini ditugaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah potensi fiskalnya, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Jadi Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya M Ribai subhanda lubis (2009; 9).

c. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan jumlah

penduduk. Sementara itu pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk merupakan hubungan fungsional.

1) Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran pemerintah
Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tertentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagainya lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur pembangunan yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi.

2) Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk
Adriani dan Handayani (2008:79) melakukan penelitian tentang pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD yang hasilnya menunjukkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruh tidak signifikan secara persial terhadap PAD, tetapi secara bersamaan kedua variabel tersebut pengaruhnya adalah signifikan PDRB dan jumlah penduduk sangat kuat dengan PAD.

Santoso dan Rahayu (2008: 18) dengan dukungan bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam maupun luar Negeri. Santoso dan Rahayu (2008:18) mengatakan, penambahan penduduk

tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat di tarik juga meningkat.

2.6 Tinjauan Empiris

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa pedoman atau tinjauan empiris yang akan mendukung karena adanya kesamaan metodologi penelitian dan objek penelitian guna tercapainya hasil yang diharapkan, diantaranya:

Putu Lia Perdana Sari (2010) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat investasi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Periode 2010-2014. Jenis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Peneliti ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat investasi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali periode 1991-2009 dan aspek perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan.

Harry A.P. Sitianiapessy (2011) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan PAD. Peneliti menggunakan

regresi berganda dan regresi sederhana. Peneliti ini bertujuan untuk menentukan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah Periode 2005-2011 dimana peneliti lebih memfokuskan pada tiga sektor yaitu sektor pengeluaran pemerintah yaitu sektor pertanian, perikanan serta perindustrian dan perdagangan karena ketiga sektor tersebut memiliki pengeluaran yang lebih besar dibanding sektor-sektor lain dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdukung.

Erma dan Yuliana Florentina (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor ekonomi yaitu produk domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan variabel PDRB dan investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Kapuas Hulu.

Khilyati Zam Zam (2016) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah angkatan kerja, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Solo Raya periode 2000-2014. Penelitian ini

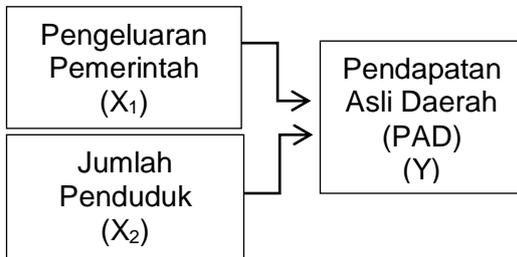
menggunakan regresi data panel. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Solo Raya.

Arman dan Junaidi (2014) meneliti tentang pengaruh pendapatan (PAD), dana alokasi umum, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Peneliti ini menggunakan regresi data panel. Peneliti ini bertujuan bahwa dapat dilihat PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Hal ini berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki efek positif karena pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di Jambi dapat meningkatkan alokasi belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak efisien.

2.7 Kerangka Konsep

Berdasarkan pada uraian tinjauan pustaka, penelitian ini mengacu antara pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pengembangan menggunakan studi empiris penelitian ini mencoba mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk merupakan fungsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep

3. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk di Kota Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah, penelitian ini menggunakan *metode analisis regresi berganda*. Analisis regresi berganda adalah suatu metode hubungan secara linier antara dua variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Dwi Priyatno 2011: 73).

Untuk menguji dua atau lebih variabel independen terdapat satu variabel dependen. Secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

Keterangan :

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- X_1 = Pengeluaran Pemerintah

- X_2 = Jumlah Penduduk
- A = Konstan
- $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Variabel
- M = Error Term

3.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis *regresi linear berganda* yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi *logistik* atau *regresi ordinal*. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data *cross sectional*.

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut *homoskedastisitas*. Deteksi uji hetero dapat dilakukan dengan metode *Uji Glejser* yaitu dengan melihat nilai signifikansi nilai di atas tingkat $\alpha = 0.05\%$ sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah

sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data *cross section* seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serentak pada saat yang bersamaan.

Model regresi yang baik tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengdiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, maka dilakukan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson. Menurut Siggih Santoso (2010:215), Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:

- 1) Jika nilai DW antara nilai DU dan $(4-DU)$ atau $DU < DW < (4-DU)$ berarti bebas dari autokorelasi.
- 2) Jika nilai DW $> DL$ atau $> (4-DL)$ berarti terdapat autokorelasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar dalam usaha untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya

3.2 Uji Statistik

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Penafsiran ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat di bebaskan oleh variabel-variabel bebasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi (*determination coefficient*) yang disimbolkan dengan R^2 . Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$).

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikannya beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%), 0,05 (5%), 0,10 (10%). Uji F penulisan menggunakan taraf signifikan 0,10 (10%), jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan yang terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terdapat terikat. Namun probabilitas nilai $f < 0,05$, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

c. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil Uji t dapat dilihat dari tabel *coefficients* pada kolom sig (significance), jika probabilitas nilai $t < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan.

tersebut dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berikut ini adalah rincian beberapa sumber penerimaan daerah yang bisa dibilang dominan atau berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar pada tahun 2013-2017.

Tabel 4.3
Rincian Penerimaan Daerah yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Kota Makassar Tahun 2013-2017

Penerimaan	2013	2014	2015	2016	2017
	Satuan Rupiah				
Bagian Pendapatan Asli Daerah	345.350.562.825	556.202.758.215	621.247.679.844	742.448.756.714	828.871.892.852
Pajak Daerah	266.065.576.931	388.445.926.266	518.703.083.895	561.697.247.681	635.674.206.877
Retribusi Daerah	58.015.145.863	69.257.410.559	79.650.936.626	135.776.884.790	115.220.022.385
Penerimaan lain-lain	14.914.639.885	20.820.918.675	22.532.217.115	33.138.980.058	64.615.641.548
Dana Perimbangan	905.316.278.541	1.105.463.603.654	1.161.279.547.759	1.836.090.960.671	1.402.787.592.484
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	470.533.278.541	455.689.010.688	578.831.348.309	62.738.013.240	720.970.425.400

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas terlihat pajak daerah adalah sumber terbesar terhadap penerimaan daerah yang memang sumbernya didapat dari daerah itu sendiri, itu disebabkan secara keseluruhan kegiatan perekonomian yang ada tidak lepas dari pemungutan pajak. Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa kota Makassar belum bisa menjadi kota yang mandiri dan masih tergantung kepada pemerintah pusat dikarenakan Dana Perimbangan yang meningkat setiap tahunnya.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar, berikut penulis menyajikan data tentang perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2013 sampai tahun 2017. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Perkembangan Jumlah Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Satuan Rupiah)	Perkembangan (%)
2013	621.247.679.844	0,10
2014	742.448.756.714	16,32
2015	828.871.892.852	10,43
2016	971.859.753.606	14,71
2017	1.337.231.047.257	27,32

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)KotaMakassar Tahun 2017

Berdasarkan Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar secara keseluruhan dapat dikatakan terus mengalami peningkatan namun secara persentase fluktuatif. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah sebesar 621.247.679.844 (0,10%), kemudian pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 742.448.756.714 (16,32), selanjutnya di tahun 2015 meningkat Rp.828.871.892.852 (10,43%). Pada tahun 2016 sebesar Rp. 971.859.753.606 (14,71%) dan pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.337.231.047.257 (27,32%).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar setiap tahunnya tidak lepas dari peran pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan. Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya misalnya, melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan sedangkan cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber penerimaan

dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan.

4.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar

Pengeluaran Pemerintah Daerah merupakan kebijakan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan instruksi Menteri dalam Negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran tersebut mudah

dilakukan. Disisi lain anggaran dapat pula menjadi bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Berikut adalah rincian beberapa kegiatan yang bisa dikatakan berpengaruh atau dominan terhadap pengeluaran pemerintah:

Tabel 4.5
Rincian Kegiatan Yang Berpengaruh Terhadap Pengeluaran Pemerintah Tahun 2013-2017

Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
	(Satuan Rupiah)				
B.Pegawai	1.072.077. 237.541	1.076.398. 167.309	1.119.417.5 64.276	1.416.545.8 67.596	1.519.242.6 82.140
B. Barang	403.634.28 0.721	535.515.01 8.617	541.234.56 1.112	559.346.63 1.714	621.313.26 7.412
B.Pemeliharaan	168.460.02 6.058	318.062.31 2.409	341.217.12 7.887	359.318.21 7.817	421.213.31 5.817
Subsidi	27.177.912 .236	8.315.550. 000	9.523.345.6 61	10.612.412. 653	18.318.650. 875

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Tabel 4.5 di atas adalah tabel dari rincian beberapa kegiatan pengeluaran pemerintah Kota Makassar yang bisa dibilang berpengaruh terhadap pengeluaran yang dilakukan pemerintah dan juga mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara keseluruhan belanja terbesar pemerintah Kota Makassar adalah belanja pegawai, itu dikarenakan oleh masuknya tunjangan sertifikasi guru.

Pada umumnya di negara yang sedang berkembang, keuangan pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena pemerintah dianggap mampu mengelola sumber daya lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan daerah.

Berikut adalah data jumlah total perkembangan pengeluaran Kota Makassar tahun 2013-2017 :

Tabel 4.6
Perkembangan Jumlah Total Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar
Tahun 2013-2017

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Satuan Ribu)	Perkembangan (%)
2013	2.026.737.762	1,11
2014	2.396.879.800	15,44
2015	3.062.274.394	21,73
2016	3.691.385.484	17,04
2017	3.820.105.599	3,37

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Pada Tabel 4.7 tahun 2013 jumlah pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 2.026.737.762 (1,11%), sedangkan di tahun 2014 jumlah pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.396.879.800(15,44%) dan ditahun 2015 pengeluaran pemerintah sangat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3.062.274.394 (21,73%), sedangkan ditahun selanjutnya yaitu di tahun 2016 perkembangan pengeluaran pemerintah menurun dari jumlah 21,73% menjadi 17,04% yakni sebesar 3,691.385.484 dan pada tahun 2017 jumlah pengeluaran pemerintah sebesar 3.820.105.599 (3,37%).

Meningkatnya pengeluaran pemerintah Kota Makassar setiap tahunnya disebabkan oleh tingkat belanja pegawai yang terus meningkat dapat dilihat pada tabel 4.5 yang dimana belanja pegawai meningkat disebabkan oleh masuknya tunjangan sertifikasi guru. pengeluaran pemerintah yang cenderung semakin meningkat ini sering

dengan meningkatnya juga Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar oleh pemerintah daerah. Dari tahun ke tahun pembiayaan pembangunan daerah kota Makassar oleh pemerintah daerah semakin meningkat sehingga memicu meningkatnya pengeluaran Pemerintah di Kota Makassar.

4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan perubahan penduduk merujuk kepada semua spesies, tapi selalu kepada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

Di Kota Makassar sendiri laju pertumbuhan penduduknya sangat pesat, itu dikarenakan oleh kencangnya laju urbanisasi ke kota dimana banyak

alasan mereka untuk pindah ke kota metropolitan seperti Makassar. Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat dengan menggunakan teori dimana ketika orang mengeluarkan pendapatannya untuk melakukan konsumsi maka akan menaikkan pendapatan orang lain, Maka dari itu berikut akan disajikan perkembangan total jumlah penduduk di Kota Makassar:

Tabel 4.7
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kota Makassar
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
2013	1.408.072	1,49
2014	1.429.422	1,48
2015	1.449.401	1,39
2016	1.469.601	1,37
2017	1.769.920	16,97

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2017

Pada Tabel 4.7 tahun 2013 jumlah penduduk Makassar bertambah 1,49% sebesar 1.408.072 jiwa, kemudian pada tahun 2014 jumlah penduduk bertambah 1,29% sebesar 1.429.422 jiwa, selanjutnya ditahun 2015 meningkat lagi 1,39% sebesar 1.449.401 jiwa, pada tahun 2016 jumlah penduduk bertambah 1,37 % atau sebesar 1.469.601 jiwa, dan di tahun 2017 jumlah penduduk semakin meningkat sebesar 16,97% sebesar 1.769.920 jiwa. Secara Keseluruhan perkembangan jumlah penduduk di Kota Makassar mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Salah satu penyebab kenaikan tersebut dikarenakan oleh kencangnya laju urbanisasi di Kota Makassar.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara Variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial. Serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian disajikan dalam rekapitulasi hasil analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Hasil Regresi
Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T	Sig
Pengeluaran Pemerintah	1,108	9,613	0,011
Jumlah Penduduk	-5,861	-17,404	0,003

Konstanta = 37.537
 R = 0,997
 R square = 0,994
 F hitung = 156,430
 Signifikan F = 0,006

Sumber : Output Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 37,537 + 1,108 X_1 - 5,861 X_2 + e$$

**Tabel 4.10 Hasil Estimasi Model Pendapatan Asli Daerah
 Model Summary^b**

Mo del	R	R Squar e	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin- Watson
					R Square Change	F Chang e	df1	df2	Sig. F Change	
1	.997 ^a	.994	.987	.02003	.994	156.4 30	2	2	.006	3.243

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: PAD

1. Nilai konstanta sebesar 37,537, maka apabila pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk bernilai konstan, maka nilai dari Pendapatan Asli Daerah 37,537.
2. Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sebesar 1,108, maka apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,108 satuan sedangkan yang lainnya konstan.
3. Nilai koefisien jumlah penduduk sebesar -5,861, maka apabila jumlah penduduk meningkat 1satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun sebesar 5,861 satuan sedangkan yang lainnya konstan.

4.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi uji R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel

terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X.

Hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai R sebesar 0,997. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah (X_1) dan jumlah penduduk (X_2) mempunyai keeratan hubungan dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,997. Pada penelitian ini untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan besaran angka R square. Hasil R square di dapat 0.994. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar sebesar 99,4% sisanya 0,6% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

4.6 Analisis Uji Simultan (Uji F)

Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Hasil perhitungan Uji F ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Uji F (Secara Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.126	2	.063	156.430	.006 ^b
Residual	.001	2	.000		
Total	.126	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk

Hasil analisis regresi berganda, variabel pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan atau bersama-sama menunjukkan hasil nilai Fhitung adalah sebesar 156,430 dengansignifikan F sebesar 0.006^b atau lebih dari 0,05 (5%) sehingga menolak H₀. Hasil ini menyatakan bahwa secara simultan semua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah dan jumlah

penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.6 Analisis Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial variabel independent terhadap variabel dependent, sementara itu secara parsial pengaruh kedua variabel independent tersebut terhadap variabel dependen ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.12
Hasil Perhitungan Uji t (Secara Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37.537	1.552		24.179	.002
	Pengeluaran Pemerintah	1.108	.115	.743	9.613	.011
	Jumlah Penduduk	-5.861	.337	-1.346	-17.404	.003

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan uji parsial melalui analisis regresi berganda. Diperoleh hasil variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah (X₁) dan jumlah penduduk (X₂) terhadap variabel Pendapatan Asli

Daerah (Y) secara parsial dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis regresi menunjukkan

koefisien regresi (B) sebesar 1,108 terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan signifikan 0.011. Berdasarkan probabilitasnya, jika probabilitasnya lebih kecil 0.05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak atau variabel tersebut berpengaruh signifikan. Dari hasil perhitungan diketahui signifikansi sebesar 0.011 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (0,011<0,05) dengan demikian pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis regresi menunjukkan koefisien regresi (B) sebesar -5,861 terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan signifikansi 0.003. Berdasarkan probabilitasnya, jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak atau variabel tersebut berpengaruh signifikan. Dari Hasil perhitungan diketahui signifikansi sebesar 0.003 bila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05, menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (0,003<0,05), dengan demikian jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.7 Pembahasan

a. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar 1,108 dengan tingkat signifikan sebesar

0,011 (0,011<0,05) dengan nilai t hitung > t tabel (156>9,6130). Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan belanja terbesar pemerintah Kota Makassar adalah belanja pegawai, itu dikarenakan oleh masuknya tunjangan sertifikasi guru.

Pada umumnya di negara yang sedang berkembang, keuangan pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena pemerintah dianggap mampu mengelola sumber daya lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan daerah.

b. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar -5,861 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 (003<0,05). Di Kota Makassar sendiri laju pertumbuhan penduduknya sangat pesat, itu dikarenakan oleh kencangnya laju urbanisasi ke kota dimana banyak alasan mereka untuk pindah ke kota metropolitan seperti Makassar. Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat dengan menggunakan teori dimana ketika orang mengeluarkan pendapatannya untuk melakukan konsumsi maka akan menaikkan

pendapatan orang lain. Namun pada tahun 2013-2017 jumlah penduduk Kota Makassar memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan bab terdahulu dan setelah melakukan uji empirik, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar 1,108 dengan tingkat signifikan sebesar 0,011 ($0,011 < 0,05$).
2. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Koefisien regresi sebesar -5,861 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 ($0,003 < 0,05$).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga ketergantungan biaya pemerintah tidak terlalu besar.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas atau memperbanyak sampel selain di Kota Makassar
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang

diharapkan dapat lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani 2008. "*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*", Raja Grafindo Persada
- Anonim 2010, "*Pendapatan Asli Daerah*" Erlangga, Jakarta
- Anata 2008, "*Analisis Kependudukan*". Erlangga, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Kota Makassar
- Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
- Darise, Nuraini. (2009). "*Pengelolaan Keamanan Daerah*". Jakarta : Indeks
- Deliarnov. (2007). "*Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Edisi Revisi*". Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul dan Mujib ibnu 2009. "*Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*". Tesis, Yogyakarta: Sekola "prombel Desentralisasi dan Perimbangan Pascasarjana UGM.
- Hasibun, Nurimmansya 1991. "*Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah*". Jakarta : Prisma
- Handayani, Andani. "*Pengaruh Pajak Daerah dan PAD Terhadap Belanja Daerah di Indonesia*" Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Hirawan, Susiyati 1997. "*Penengaruh Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*" Skripsi. Yogyakarta : BPFE UGM

- Junaidi dan Arman 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi". *Prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol.2.No.2.
- Mardiasmo 2009, "Pajak Daerah". Yogyakarta :BPFE
- Prakosa 2010. "Pajak dan Retribusi Daerah". Yogyakarta: UII Press
- Rindu K 2009. "Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Makassar". Skripsi. Makassar Fakultas Ekonomi Hasanuddin
- Santoso dan Rahayu 2005. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri". *Dinamika Pembangunan* Vol.2.No.1.
- Sugiono 2012. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods". Bandung : Alfabeta
- Safitri 2009. "Otonomi Daerah". Jakarta: Penerbit Kencana.
- Simanjuntak 2011. "Kependudukan". Yogyakarta : BPFE
- Srasati El Rani, F.T, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan" Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sholeh dan Rochmasjah Heru, 2010. "Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Kelolah Pemerintah yang Baik" Bandung: Fokusmedi.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004. "Otonomi daerah". <https://core.ac.uk>
- UU No 33 Tahun 2004. "Perimbangan Keuangan". <https://core.ac.uk>
- Winambo 2013. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Bali". *Analisis Pendapatan* Vol.2.
-